

ABSTRAK

Nikmatul Husna, 1920110006, Hak Asuh Anak Bagi Perceraian Sebab Istri Murtad Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg.)

Tanggung jawab mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban setiap orang tua. Tanggung jawab ini tidak akan lepas sekalipun kedua orang tua telah berpisah. *Hadhanah* adalah pengasuhan anak laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia *mumayiz* atau yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri oleh orang yang berhak mengasuhnya. Permasalahan *hadhanah* sering timbul akibat terjadinya perceraian. Dalam hal terjadinya perceraian anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. serta melakukan analisis hukum dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif sehingga hasilnya merupakan deskripsi dan jabaran-jabaran dari hasil penelitian. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa observasi ke Pengadilan Agama Semarang, wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang, dan dokumentasi, serta bahan hukum sekunder yang berbentuk buku maupun jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Hakim menggunakan dasar hukum pasal 105 ayat 1 dalam putusan Nomor 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. dikarenakan Majelis Hakim telah mempertimbangkan kebutuhan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Majelis Hakim menjelaskan bahwa untuk menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak/*hadhanah* kepada ibu. Secara hukum normatif mengenai hak asuh anak diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya. Sedangkan menurut empat mazhab dan kitab fiqh dijelaskan bahwa seorang yang berhak mendapatkan hak asuh anak harus memenuhi 7 syarat yaitu berakal, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, menetap, dan tidak bersuami baru.

Dengan alasan serta pertimbangan Majelis Hakim demi memberikan rasa keadilan dan menegakkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim memilih mengedepankan dari segi aspek kebutuhan primer (*dharuriyah*) bagi anak yang masih dalam masa persusuan dan belum *mumayiz*. Sekalipun pertimbangan Hakim ini berlainan dengan hukum fiqh yang apabila seorang pemegang *hadhanah* yang telah murtad maka gugurlah haknya. Namun melihat kondisi kasusitik dalam fakta di pengadilan bahwa anak tersebut masih bayi, masih membutuhkan ASI maka demi kemanfaatan dan pertumbuhan serta perkembangan anak, hak asuh anak tetap pada ibunya karena pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik dan kesehatan akal menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemashahatan menjaga akidah anak tersebut.

Kata Kunci : *Hadhanah, mumayiz, dan murtad.*

ABSTRACT

Nikmatul Husna, 1920110006, Child Custody Rights for Divorce Due to Apostate Wife Perspective of Maqashid Shari'ah (Case Study of PA Semarang Decision Number 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg).

The responsibility of caring for and nurturing children is an obligation of every parent. This responsibility will not be relinquished even if the parents have separated. Hadhanah is the care of boys and girls who have not reached the age of mumayiz or who cannot take care of themselves by people who have the right to care for them. Hadhanah problems often arise as a result of divorce. In the event of divorce, children who are not yet mumayiz are the right of the mother.

The focus of this research is to find out the legal basis and considerations used by the judge in deciding case number 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. as well as conducting legal analysis in the maqashid shari'ah perspective. This research uses a type of case study research using a type of leatherative approach so that the results are descriptions and explanations of the research results. The legal materials used are primary legal materials in the form of observations to the Semarang Religious Court, interviews with Judges of the Semarang Religious Court, and documentation, as well as secondary legal materials in the form of books and journals.

Based on the results of the study, it is stated that the Judges used the legal basis of Article 105 paragraph 1 in Decision Number 1101/Pdt.G/2022/PA.Smg. because the Panel of Judges had considered the needs or best interests of the child. The Panel of Judges explained that to guarantee, protect, and fulfill the rights of children as in Law Number 35 of 2014 jo. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the Panel of Judges imposed child custody/hadhanah to the mother. Normative law regarding child custody is regulated in Article 105 of the Compilation of Islamic Law that children who are not yet mumayiz are the right of the mother. Meanwhile, according to the four mahzabs and fiqh books, it is explained that a person who is entitled to child custody must fulfill 7 conditions, namely being intelligent, independent, Muslim, simple, trustworthy, settled, and not having a new husband.

With the reasons and considerations of the Panel of Judges in order to provide a sense of justice and uphold the principle of the best interests of the child, the Panel of Judges chose to prioritize in terms of aspects of primary needs (dharuriyah) for children who are still in the breastfeeding period and not yet mumayiz. Even though the Judge's consideration is different from the fiqh law that if a hadhanah holder who has apostatized then his rights are canceled. However, considering the fact that the child is still a baby and still needs breast milk, for the benefit of the child's growth and development, the custody of the child remains with the mother because in this phase, maintaining the development of physical health and intellectual health becomes a priority if it has to clash with the evil of protecting the child's creed.

Keywords: Hadhanah, mumayiz, and apostasy.